
**DAMPAK DAN PELUANG PARIWISATA BALI PASCA PANDEMI COVID-19
DENGAN MEMANFAATKAN DIGITALISASI**

Elmie., Universitas Jayabaya
I Gede Nara Asnanda, Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keyword: <i>Pandemic, Digitalisasi, Entrepreneur, Tourism</i></p> <p>Corresponding Author: 2022010161006@pascajayabaya.ac.id</p> <p>Manajerial ISSN 2502-5546</p>	<p><i>Tourism is one of the most significant contributors to Indonesia's national income after the oil and gas sector; Therefore, this sector continues to receive government attention to increase the sustainable growth of the tourism industry. Covid-19 has created uncertainty, so information regarding government policies is very important to convey to the public. This research is a qualitative research with interpretive type. Interpretive research aims to understand social reality which in this context understands the implications of the pandemic for the tourism sector in Indonesia. The data source used in this research is secondary data obtained through internet circulation on the official website. Secondary data that has been successfully obtained by researchers becomes material in conducting data analysis. The results of the research show that the Ministry of Tourism and Creative Industries is making efforts to recover from the impact of COVID-19 on the tourism sector with various policies. This paper describes government policies in the tourism sector, namely the tourism sector recovery program in the context of accelerating the handling of the impact of COVID-19; this is very important because tourism also involves a lot of workers.</i></p>

PENDAHULUAN

Virus covid-19 adalah virus yang menyerang system pernapasan, penyakit ini merupakan penyakit yang mengganggu system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga berujung kematian. Virus covid-19 merupakan jenis virus baru yang menular bukan kepada binatang saja namun berdampak kepada manusia. Virus ini datang pertama kali atau di temukan pertama kali di china. Wabah virus ini sangat mematikan sering menyerang anggota tubuh yang rentan seperti saluran pernapasan yaitu paru-paru, gejala yang dialami seperti sesak napas, hilangnya indra penciuman, kurangnya nafsu makan, penurunan berat badan, pilek, batuk berkepanjangan, dan disertai panas yang tak kunjung hilang. Virus covid-19 ini tersebar lewat:

- a. Menyebar lewat udara
- b. Menyerang system pernafasan
- c. Menyebabkan sulit nafas, pneumonia, demam tinggi hingga kematian
- d. Berbentuk bulat dengan lapisan pelindung bersisi tajam
- e. Memiliki materi genetic berupa RNA
- f. Dapat mengalami masa inkubasi hingga 14 hari
- g. Dapat menyebar meski penderitanya tidak menunjukkan gejala

Maka dari itu pemerintah bersikeras melakukan penertiban yaitu penggunaan masker saat berpergian keluar rumah, bagi pembuka usaha seperti indomaret maupun pedagang kecil harus wajib menyediakan hendsenitaiser dan tempat pencuci tangan sebelum memasuki area tempat tersebut. Langkah ini dilakukan guna mengurangi penambahan orang yang teridentifikasi covid-19. Selain itu juga jaga jarak antar sesame demi kesehatan bersama. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk Mengetahui apa saja dampak yang diakibatkan dari virus covid-19 dan memberikan pemahaman tentang virus covid-19 kepada masyarakat

RUMUSAN MASALAH

Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat?
2. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19?
3. Bagaimana cara mencegah penyebaran Covid-19 di sektor pariwisata?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja dampak yang diakibatkan dari virus covid-19 dan memberikan pemahaman tentang virus covid-19 kepada masyarakat.
2. Memahami tentang bagaimana meningkatkan ekonomi pasca virus covid-19 ini.
3. Digitalisasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam sektor pariwisata

MANFAAT PENELITIAN

Terdiri dari dua Manfaat secara teoritik diharapkan melalui penelitian ini:

1. Bagi Penulis
Mengembangkan dan menambah wawasan dalam hal ilmu pariwisata dalam menghadapi badai pandemi virus covid-19.
2. Bagi Universitas Jayabaya
Menambah literatur dibidang penelitian mengenai pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata.

Sedangkan manfaat prakteknya diharapkan hasil kajian dalam penelitian ini memberikan masukan bagi:

1. Bagi Penulis
Menambah pengalaman untuk melakukan analisis digitalisasi terhadap sektor pariwisata.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya.
Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian

selanjutnya, sebagai dasar pengembangan lebih lanjut, dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin menyelidiki obyek yang sejenis.

KAJIAN PUSTAKA

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dinamakan corona virus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota(crown/corona). Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSCoV) beberapa tahun silam. Adapun cara mendiagnosis covid-19 yaitu dengan CT Scan pada dada. Cara ini disebut-sebut efektif untuk mendiagnosis virus corona didalam tubuh dengan angka hingga 89,9 persen. Meski begitu, metode ini dapat salah mengidentifikasi sebanyak 38 persen pada seseorang yang tidak mengidap covid-19. Para ahli mengatakan adapun cara mengetahui berapa lama covid-19 dapat bertahan didalam tubuh, orang yang kembali terinfeksi terkena virus corona tidak mengulangi gejala yang seperti ketika terinfeksi pertama kali (Paramita, 2020). Sementara itu dalam studi yang terbaru yang dipublikasikan di jurnal Science pada 6 januari 2021 lalu, ditemukan bahwa kekebalan dapat bertahan selama 8 bulan. Covid-19 sangat berbahaya pada orang tua, kenapa? Karena system imun yang sudah melemah ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan risiko covid-19 pada lansia, baik risiko terjadinya infeksi virus corona maupun risiko virus ini untuk menimbulkan gangguan yang parah, bahkan kematian. Adapun bagian tubuh yang rentan diserang oleh penyakit covid-19 yaitu paru-paru. Virus ini menyerang seluruh bagian paru-paru orang yang tertular. Maka dari itu masyarakat diminta lebih hati-hati dengan memakai

masker sesuai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Adapun dampak dari adanya covid-19 ini bagi masyarakat yakni sebagai berikut

Dampak Positif

1. Masyarakat lebih peduli, Kesadaran dan disiplin masyarakat terjadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat.
2. Timbulnya kecurigaan sesama nakes karena takut saling menularkan. Ini sebenarnya baik karena membuat nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri.
3. Kehidupan nakes lebih teratur, Nakes biasanya kerja pagi sampai malam tanpa istirahat, maka saat pandemi ini semua lebih banyak waktu untuk istirahat. Kehidupan lebih teratur, Adanya pembatasan jam kerja atau praktik membuat tenaga kesehatan lebih cukup istirahat, makan lebih teratur dan rajin berolahraga.
4. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga, Kehadiran COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya olahraga, yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar.
5. Ilmuwan terpacu, Para peneliti dan ilmuwan terpacu menemukan vaksin yang dapat mencegah terjadinya COVID-19.

Dampak Negatif

1. Rumah sakit kewalahan, rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 kewalahan menampung pasien sampai saat ini. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.
2. Nakes tertular, Tenaga kesehatan berisiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak

- menggunakan APD sesuai tingkat perlindungan penanganan pasien COVID-19.
3. Takut ke rumah sakit, Pasien Non-COVID-19 ikut merasa cemas dan takut. Misalnya saja pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronik seperti pasien diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru kronik, autoimun, pasien hemodialisis (cuci darah), pasien kemoterapi yang memerlukan pengobatan rutin jadi takut datang ke rumah sakit. Para pasien ini takut tertular COVID-19 di rumah sakit. "Hal ini menyebabkan pasien kronik yang biasa kontrol rutin setiap bulan tidak datang ke rumah sakit untuk mendapatkan obat bulanan sehingga penyakit mereka menjadi tidak terkontrol, dan menimbulkan keluhan lain.
 4. Pasien COVID depresi, Pasien COVID-19 juga merasa cemas, takut bahkan depresi. Rasa takut ini bisa karena belum jelas obatnya maupun kesepian akibat isolasi sehingga tak bisa bertemu keluarga secara langsung, menyesal karena tak mengikuti protokol kesehatan, hingga tak percaya diri akibat muncul stigma penyakit ini adalah aib.
 5. Nakes juga takut dan cemas, Tenaga kesehatan (nakes) memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada keluarganya. Karena tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang perlu dilindungi. Belum lagi banyaknya nakes yang positif dan meninggal, ini menambah tinggal kecemasan pada nakes.
 6. Stigma buruk ke nakes, Banyak masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID-19.

Kegiatan pelaksanaan penertiban penegakan hukum Perbup No.41 Tahun 2020 tentang penertiban disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian corona virus disease 2009 dalam tatanan kehidupan baru, sejak tanggal, 8-03-2021 telah dilaksanakan secara serentak diseluruh kecamatan sekabupaten buleleng.

Kegiatan ini bersinergi dengan pihak TNI, POLRI, Polisi Militer, Intelijen, OPD, dan Satpol PP Kecamatan.

Kepada pelanggar yang tidak memakai masker dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000 sedangkan yang tidak memakai masker dengan baik dan benar diberikan pembinaan. Bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan sarana protocol kesehatan seperti tempat mencuci tangan juga diberikan pembinaan. Adapun hasil kegiatan dikecamatan buleleng yang diberikan pembinaan 1 orang dan dijalan Ahmad Yani diberikan pembinaan 4 orang pelaku usaha. Pembinaan dan denda ini diberikan agar membiasakan diri memakai masker kemana pun berpergian keluar rumah ataupun didalam rumah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Penertiban masker di kota singaraja masih berlanjut, hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Bahkan, penertiban masker tidak hanya dilakukan pagi/siang hari, melainkan saat malam hingga dini hari. Tujuan Patroli kali ini menuju kearah barat yaitu desa kalibukbuk, adapun hasil yang didapat terdapat 2 orang tidak memakai masker dan langsung diberikan pembinaan dan penindakan berupa surat pernyataan dan jika ada anak dibawah umur akan diberikan tindakan berupa pushup. Penindakan penertiban ini agar masyarakat sadar akan bahayanya penularan virus covid-19 dan wajib menggunakan masker pada saat keluar rumah. Beberapa waktu lalu, muncul narasi di media social yang menyebutkan bahwa banyak orang yang terinfeksi covid -19 sebelumnya selalu mengenakan masker dan sebagian kecil orang yang negative tidak pernah memakai masker (Arini & Paramita, 2020).

Informasi ini disebut mengutip laporan dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC). Merespon informasi CDC menegaskan bahwa interpretasi tersebut salah. Menurut CDC, banyak bukti yang menunjukkan bahwa memakai masker ditempat umum dapat mengurangi penularan covid -

19 dengan cara memblokir tetesan pernapasan (droplets).

Adapun tim gabungan kecamatan gerogak yang terdiri dari polri, satpol pp kecamatan gerogak, untuk melaksanakan Operasi penertiban wajib pakai masker sesuai dengan peraturan gubernur nomor 46 dan peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Kali ini yang menjadi agenda penegakan Pergup dan Perbup yaitu desa gerogak tepatnya didepan kantor polisi sector gerogak. Dalam operasi penertiban wajib pakai masker terdapat 7 orang pelanggar/tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan didapati beberapa warga atau pengendara mobil dan sepeda motor yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar saat keluar rumah dan langsung diberikan pembinaan oleh petugas supaya kedepannya lebih tertib dalam penegakan Perbup No. 41 Tahun 2020. Pelaksanaan penegakan Pergup No. 46 dan Perbup 41 tahun 2020 terus dilaksanakan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran penularan virus covid-19, dengan menyadarkan masyarakat tentang Protokol Kesehatan agar selalu dan wajib memakai masker saat beraktifitas diluar rumah.

Gabungan kecamatan busung biu melaksanakan operasi penertiban wajib pakai masker didesa sepang. Operasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan gubernur Bali No. 46 tahun 2020 dan peraturan Bupati Buleleng No.41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam tatanan kehidupan Era baru. Bertempat di area depan kantor Perbekel Sepang, Tim Gabungan yang terdiri dari Polsek Kecamatan Busungbiu, Koramil 1609-07 Kecamatan Busungbiu dan Satuan polisi Pamung Peraja kecamatan Busung Biu merazia para pengendara dan orang-orang yang melintas. Selama sekitar 2 jam, operasi ini digelar dibawah pemantauan langsung dari Kasibimas Satpol PP Kabupaten

Buleleng. Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, sebagai tuan rumah perbekel dan perangkat desa Sepang serta unsur Satgas gotong royong desa adat Sepang. Dalam operasi kali ini, terdapat 5 orang pelanggar yang terjaring razia. Dimana dari 5 orang tersebut, 2 orang diantaranya bukan merupakan masyarakat Desa Sepang. Adapun tindakan yang diambil petugas terhadap mereka yang terjaring Razia ini diantaranya dengan membayar denda Rp.100.000 yang akan termasuk ke kas daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dibuatkan surat pernyataan. Selain itu, pembinaan juga dilakukan oleh petugas kepada warga yang masih menggunakan masker dengan tidak benar. Sebagai informasi, sosialisasi terkait wajib pakai masker sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan covid-19 ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan sebelum Pergub dan Perbup tersebut diterbitkan. Ketika pergup Bali Nomor 46 dan perbup Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 mulai diberlakukan, sosialisasi akan ketentuan yang termuat di dalamnya lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Sepang yang telah melakukan sosialisasi baik secara langsung melalui pengeras suara dengan mobil keliling, penyampaian lisan pada setiap pertemuan dan rapat-rapat yang turut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Sepang.

Tim Yustisi Kota Singaraja jaring 4 orang pelanggar protokol kesehatan utamanya masker. Sidak tersebut digelar di Desa Banyuning, razia di pusatkan di Jln. Setia Budi.

Adapun yang dilibatkan yakni SatpolPP Buleleng dan Polsek. Dari 4 orang yang terjaring razia semua dalam memakai masker memakai masker namun penggunaan yang tidak benar, seperti contoh masker yang di bawa saja namun tidak di pakai dan ada memakai namun tidak menutupi sampai hidung dan mulut melainkan hanya sampai dagu, dan langsung kami berikan pembinaan dan berikan surat pernyataan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif.

PEMBAHASAN

Adapun tujuan Kegiatan ini agar masyarakat dapat terhindar dari penyebaran VIRUS COVID 19 dan agar terbiasa memakai masker saat keluar rumah. Selanjutnya Penertiban dalam Menggunakan Masker sesuai Perbup No 41 Th 2020 kembali dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Bersama Polres melakukan patroli untuk hari ini tidak ada hasil yang di dapat, masyarakat sudah mulai tertib akan memakai masker, tujuan patroli menuju Desa Pemaron lanjut ke Pantai Penimbangan dan terakhir ke pasar Banyuasri, di harapkan masyarakat agar terus memakai masker agar terhindar dari penularan Covid 19 (Naba & Paramita, 2021)

Penertiban dalam penggunaan masker kembali berlanjut dengan jumlah pasukan Satpol PP 18 Orang dan 11 orang dari Polres. Tujuan patroli kali ini awal dari polres menuju Pasar Anyar lanjut ke Pelabuhan dan terakhir di Terminal Penarukan, adapun hasil yang di dapat berjumlah 4 orang, 1 orang di bawah umur langsung di berikan sanksi fisik yaitu berupa Push Up di tempat, dan 3 orang di berikan surat pernyataan. Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sadar akan bahayanya penularan virus Covid 19

Pemerintah mengeluarkan upaya untuk memutuskan rantai penyebaran virus, salah satunya dengan melakukan pembatasan social dan diam di rumah aja. Dengan tindakan pemerintah tersebut membuat masyarakat melakukan karantina mandiri di rumahnya masing masing dan tidak dipungkiri peningkatan konsumsi terhadap media juga meningkat.

Berdasarkan hasil pantauan Nielsen Television Audience Measurement (TAM) di 11 kota menunjukkan rata-rata kepemirsaaan TV mulai meningkat dari 12% di tanggal 11 Maret menjadi

13,8% di tanggal 18 Maret yang setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsaa TV .Untuk durasi menonton juga mengalami peningkatan dari rata-rata 4 jam 48 menit di rating 11.2% menjadi 5 jam 29 menit di rating 13.7%, pada tanggal 11 Maret sampai dengan 18 Maret. Kenaikan kepemirsaaan mengenai maraknya pemberitaan terkait covid-19 di stasiun televisi pada 1-18 Maret berkontribusi pada program berita. Kecenderungan masyarakat dalam menonton televisi pada program berita naik secara signifikan yaitu +25%, terutama pada penonton kalangan atas (Nielsen.com, 2020). Gambar 1. Grafik peningkatan konsumsi media televisi (Nielsen Company) Grafik hasil riset Nielsen Media menyatakan, rata-rata waktu menonton TV masyarakat Indonesia di tanggal 23-29 Maret ada di angka 3 jam 29 menit. Waktu rata-rata ini naik dari posisi pekan sebelumnya sebesar 3 jam 19 menit (Lokadata.id, 2020b). Semakin kasus ini menyebar, semakin penting juga peran televisi, karena dengan banyak kasus maka media televisi akan sering menyampaikan informasi pada masyarakat, dan masyarakat membutuhkan informasi tersebut. Namun, terkadang hal itu banyak dimanfaatkan media dengan ikut memberitakan isu untuk kepentingan value dan keuntungan mediana itu sendiri. Seperti halnya berita mengenai peningkatan jumlah pasien yang meninggal, adanya orang tanpa gejala tetapi positif terkena virus, keterbatasan bahan makanan (sembako), pemutusan kontrak kerja, maraknya kasus kriminal, dan peredaran video mengenai orang yang tiba-tiba tergeletak di jalanan. Selain itu isu-isu hoaks yang di temukan oleh Kominfo juga semakin meningkat terutama di media sosial. Pakar komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Lukas Ispandriarno, menilai bahwa ada media yang ingin memberikan informasi yang terverifikasi tetapi ada juga media yang tampak memanfaatkan isu virus corona untuk mendongkrak khalayak (Voaindonesia, 2020). Imbas dari pemberitaan yang disampaikan dalam televisi, tidak sedikit menyebabkan warga menjadi lebih mudah terpengaruh dan membuat mereka menjadi cemas.

Pasalnya, di setiap program berita, selalu ada pemberitaan mengenai perkembangan kasus Covid-19 jadi secara tidak langsung berita tersebut sering menerpa masyarakat setiap harinya. Tayangan berita mengenai covid-19 memberikan dampak yang besar bagi pemirsanya. Seringnya menonton tayangan berita covid-19 di televisi membuat orang beranggapan bahwa pandemi ini menjadi hal serius yang harus kita hadapi saat ini. Tayangan mengenai korban dan dampak pandemi yang dilihat pemirsa di televisi Dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Pemberitaan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah seperti para pedagang kaki lima yang kesehariannya bertemu banyak orang di lingkungan sekitarnya bahkan di pasar. Dengan adanya pandemi ini dan upaya pemerintah yang menyarankan untuk diam di rumah aja, tidak dipungkiri membuat para pedagang kaki lima ini sulit untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya. Bahkan seringkali berita yang disampaikan dalam televisi mempunyai pengaruh besar terhadap pedagang kaki lima, karena disamping pemberitaan mengenai bahaya penyebaran virus ini seperti yang ditayangkan dalam televisi, mereka harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Tingkah media inilah yang menjadi hal menakutkan serta membuat banyak orang merasa cemas untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat kampung Cikedokan, Garut, dimana mata pencaharian mereka adalah sebagai pedagang kaki lima. Walaupun, pada awalnya kota Garut tidak begitu parah dalam jumlah kasus, namun dengan banyaknya perantau yang pulang kampung dari berbagai daerah, itu membuat para masyarakat di kota Garut serta pedagang kaki lima disini merasa lebih khawatir. Sesuai dengan informasi yang disampaikan berita dalam televisi, lonjakan perkembangan kasus yang terjadi, seperti penambahan kasus, test rapid, bantuan sosial dan bahkan ada pula yang mengabarkan terkait menghilangnya salah satu pasien ODP di rumah sakit Garut. Hal ini membuat pedagang kaki lima merasa

cemas, karena mereka bertemu banyak orang yang menjadi pembelinya di lingkungan tersebut dan tidak tahu status kesehatannya, walaupun demikian mereka tetap saja berjualan ditengah Bayaknya resiko yang akan diterima, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-harinya. Adanya keadaan ini, televisi memberikan efek positif dan negatif. Jadi apapun yang disampaikan oleh media akan menimbulkan efek secara langsung pada pedagang kaki lima karena mereka akan menerima informasi yang mereka butuhkan begitu saja di tengah kasus yang sedang terjadi. Tidak mengherankan seringkali berita mengenai covid-19 yang ditayangkan oleh berita di televisi sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Mereka tidak pernah mengetahui apakah tayangan itu berpengaruh atau tidak. Bagi sebagian masyarakat, berita di televisi hanyalah sebuah berita dan tidak membahayakan. Oleh karena itu, pandemi dan terpaan berita media ini membuat pedagang kaki lima merasa tidak aman dan secara tidak langsung merasa terganggu dalam. Kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Semakin baik kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat yang ditunjukkan. Secara garis besar, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diperoleh dari 20 Puskesmas di Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori "Baik". Hal ini dapat dilihat dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdiri dari 9 unsur kepuasan yang mendapatkan hasil yaitu 85.94 dan masuk dalam kategori "Baik". Dari 20 Puskesmas yang dilakukan pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat ada puskesmas yang mengalami kenaikan nilai IKM di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi juga ada yang mengalami penurunan. Pada tahun 2019, hanya dilakukan pengukuran di 11 puskesmas saja di Kabupaten Buleleng dimana 5 puskesmas mengalami peningkatan yaitu Puskesmas Sawan II, Puskesmas Banjar I, Puskesmas Tejakula I, Puskesmas Buleleng I dan Puskesmas Buleleng II. Sedangkan puskesmas yang mengalami penurunan nilai IKM juga sebanyak

6 puskesmas yaitu Puskesmas Sukasada I, Puskesmas Kubutambahan I, Puskesmas Gerokgak, Puskesmas Buleleng III, dan Puskesmas Seririt I. Tahun 2020, nilai IKM untuk seluruh Puskesmas di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan sebanyak 1.5 poin dibandingkan tahun 2019 dimana nilai IKM yang diperoleh sebesar 84.44. Pada tahun 2019, dari 10 puskesmas sebanyak 7 puskesmas masuk dalam kategori mutu pelayanan “Baik” dan 3 puskesmas masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 12 puskesmas masuk dalam kategori “Baik”, 7 puskesmas masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan 1 puskesmas masuk dalam kategori “Kurang Baik”. Unsur yang memiliki nilai paling rendah dalam Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8). Unsur ini juga mendapatkan nilai paling rendah saat perhitungan Nilai IKM pada tahun 2019. Item tentang pemberian umpan balik terhadap keluhan, saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola bahwa suara pasien/masyarakat didengar dan dijadikan dasar untuk melakukan rencana perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan hal itu, secara umum seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng juga harus mulai meningkatkan manajemen penanganan aduan, saran dan masukan pasien baik berawal dari perbaikan mekanisme pengajuan aduan sampai dengan tindak lanjut. Hal tersebut sangatlah bermanfaat apabila ingin meningkatkan kualitas layanan yang berdasar pada *evident based* yang disampaikan langsung oleh pasien atau pengguna jasa pelayanan. Selain itu, item tentang umpan balik dari masukan, saran dan aduan juga harus diperlihatkan dalam bentuk perubahan sistem, kebijakan, tindakan atau pola kerja yang dapat dilihat atau dirasakan langsung oleh para pasien yang telah memberi saran dan masukan tersebut. Hasil pengukuran kepuasan menggunakan rata-rata skor pada 41 item pernyataan kepuasan yang menunjukkan skor rata-rata yang didapatkan adalah 8.68 (SD=0.84). Artinya dari rentang skor 1 (kategori

sangat tidak puas) sampai skor 10 (kategori sangat puas), tingkat kepuasan responden berada pada Kategori “Puas”. Hasil pengukuran proporsi atau persentase terhadap 41 item pernyataan kepuasan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab pada rentang jawaban nilai 8 (35%), nilai 9 (33%) dan nilai 10 (22%). Hanya sebagian kecil yang menjawab pada rentang nilai 1-7. Hal tersebut bermakna bahwa sebagian besar masyarakat sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik terhadap pelayanan yang tersebut bermakna bahwa sebagian besar masyarakat sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas di Kabupaten Buleleng. Dari perhitungan perbedaan rata-rata kepuasan berdasarkan karakteristik sosial demografi, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel kelompok umur, pekerjaan, pembiayaan, jenis kepesertaan, jenis layanan, penghasilan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan pekerjaan, diketahui kelompok responden yang memiliki pekerjaan sebagai pensiunan memiliki tingkat kepuasan paling tinggi. Berdasarkan kelompok umur diketahui umur 40-59 tahun memiliki tingkat kepuasan paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, sedangkan kelompok umur < 20 tahun memiliki tingkat kepuasan paling rendah. Hal ini menunjukkan semakin matang usia maka tingkat kepuasan semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Selain melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan, dilakukan juga pengukuran terhadap persepsi masyarakat dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi Covid 19. Sebagian besar responden memiliki persepsi yang sama terhadap kerentanan terhadap Covid-19 dan menerapkan perilaku protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker, hand sanitizer, menutup hidung saat bersin ataupun batuk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin paham dalam melakukan perlindungan diri untuk mencegah terinfeksi virus Covid-19. Jika dilihat dari

kesiapan pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19, diketahui bahwa Puskesmas di Kabupaten Buleleng sudah menerapkan aturan atau protokol yang cukup ketat. Ini dapat dilihat dari pernyataan responden yang menyatakan bahwa di puskesmas sudah menerapkan aturan seperti: 1. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki fasilitas kesehatan, 2. Petugas puskesmas menggunakan APD saat melayani pasien, 3. Mengingatkan pasien untuk cuci tangan dengan sabun sebelum mendapatkan pelayanan, 4. Pengaturan jaga jarak 1-2 meter bagi pengunjung saat mendaftar layanan, 5. Tersedianya sarana dan prasarana seperti wastafel untuk cuci tangan dan kursi dengan tanda silang untuk jaga jarak pengunjung. Penerapan protokol kesehatan yang baik dari pihak pengunjung atau puskesmas diharapkan dapat mencegah penyebaran virus covid-19 dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk tetap dapat berobat ke fasilitas kesehatan dengan aman. Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu permasalahan dari daerah yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi akan

menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima berkembang tak terkontrol karena semakin besarnya kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk. Kemudahan mencari uang dengan berdagang membuat masyarakat menganggap berdagang adalah satu-satunya cara bagi mereka mendapatkan pemasukan keluarga. Tetapi mereka tidak memperhatikan dampak yang terjadi pada kota yang mereka tinggali jika pedagang kaki lima muncul tak beraturan hingga mereka mengambil tempat-tempat strategis yang seharusnya tempat tersebut tidak. Masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah daerah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah daerah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah daerah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah daerah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktenntran yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, yang paling menarik menurut kami dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economy. Kita juga harus melihat bahwa PKL memiliki beberapa segi positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL maka pemerintah daerah harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih

baik kepada para PKL tersebut, dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah khususnya pada warga golongan menengah bawah. Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di PKL maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain terutama kesehatan dan pendidikan. Apabila kita berbicara mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah daerah pasti mempunyai alas hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah daerah tunduk pada undang-undang. Kebijakan publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berbicara mengenai kebijakan pemerintah daerah berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kembali pada persoalan pertama, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah). Pemerintah daerah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain.

1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
2. Kios kios tersebut disediakan secara gratis.
3. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi.
4. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, Pemerintah daerah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios – kios yang disediakan pemerintah daerah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah daerah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL. Pemerintah daerah Kota merasa telah melakukan yang terbaik bagi para PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini. Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu;

- Pertama dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah daerah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikut sertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah daerah hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.
- Kedua adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, Pemerintah daerah seringkali menggunakan perspektif yang teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau sharing informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda.

Selama ini, pedagang kaki lima menganggap Pemerintah daerah Kota tidak pernah memberikan rasionalisasi dan sosialisasi atas kebijakan relokasi yang dikeluarkan, sehingga pedagang kaki lima curiga bahwa relokasi tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan dan kepentingan Pemerintah daerah Kota atas proyek tamanisasi. Selain itu, tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, sehingga pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa keberadaan PKL di perkotaan bisa kita katakan tidak teratur, umumnya mereka tidak tertib dan jorok karena mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan dibadan jalan, sehingga menjadi / penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota.

Pemberitaan mengenai perkembangan kasus Covid-19 jadi secara tidak langsung berita tersebut sering menerpa masyarakat setiap harinya. Tayangan berita mengenai covid19 memberikan dampak yang besar bagi pemirsanya. Seringnya menonton tayangan berita covid-19 di televisi membuat orang beranggapan bahwa pandemi ini menjadi hal serius yang harus kita hadapi saat ini. Tayangan mengenai korban dan dampak pandemi yang dilihat pemirsa di televisi dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Pemberitaan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah seperti para pedagang kaki lima yang kesehariannya bertemu banyak orang di lingkungan sekitarnya bahkan di pasar. Dengan adanya pandemi ini dan upaya pemerintah yang menyarankan untuk diam di rumah aja, tidak dipungkiri membuat para pedagang kaki lima ini sulit untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya.

Bahkan seringnya berita yang disampaikan dalam televisi mempunyai pengaruh besar terhadap pedagang kaki lima, karena disamping pemberitaan mengenai bahaya penyebaran virus ini seperti yang ditayangkan dalam televisi, mereka harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Tingkah media inilah yang menjadi hal menakutkan serta membuat banyak orang merasa cemas untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat kampung Cikedokan, Garut, dimana mata pencaharian mereka adalah sebagai pedagang kaki lima. Walaupun, pada awalnya kota Garut tidak begitu parah dalam jumlah kasus, namun dengan banyaknya perantau yang pulang kampung dari berbagai daerah, itu membuat para masyarakat di kota Garut serta pedagang kaki lima disini merasa lebih khawatir. Sesuai dengan informasi yang disampaikan berita dalam televisi, lonjakan perkembangan kasus yang terjadi, seperti penambahan kasus, testrapid, bantuan sosial dan bahkan ada pula yang mengabarkan terkait menghilangnya salah satu pasien ODP di rumah sakit Garut. Hal ini membuat pedagang kaki lima merasa cemas, karena mereka bertemu banyak orang yang menjadi pembelinya di lingkungan tersebut dan tidak tahu status kesehatannya, walaupun demikian mereka tetap saja berjualan ditengah banyaknya resiko yang akan diterima, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-harinya.

Adanya keadaan ini, televisi memberikan efek positif dan negatif. Jadi apapun yang disampaikan oleh media akan menimbulkan efek secara langsung pada pedagang kaki lima karena mereka akan menerima informasi yang mereka butuhkan begitu saja di tengah kasus yang sedang terjadi. Tidak mengherankan seringnya berita mengenai covid-19 yang ditayangkan oleh berita di televisi sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Mereka tidak pernah mengetahui apakah tayangan itu berpengaruh atau tidak. Bagi sebagian masyarakat, berita di televisi hanyalah sebuah berita dan tidak membahayakan.

Oleh karena itu, pandemi dan terpaan berita media ini membuat pedagang kaki lima merasa tidak aman dan secara tidak langsung merasa terganggu dalam sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2019 Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34.374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Namun sejalan dengan adanya Dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran:

1. sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. penyedia lapangan kerja terbesar.
3. pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Adanya Coronavirus disease 2019 (Pandemi Covid 19) di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 juga dirasakan sektor UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini meliputi 5 aspek yakni 1) Aspek penjualan. Rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%, 2) Aspek laba usaha. Rata-rata penurunan laba usaha sebesar 61%, 3) Aspek

permodalan. Jumlah UMKM yang mengalami permasalahan modal meningkat menjadi 71,4%, 4) Aspek jumlah karyawan. Pada aspek ini, UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan sebesar 22%, dan 5) Aspek kemampuan pembayaran angsuran bank. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sudah menerapkan strategi penjualan online, meskipun belum semuanya. Jumlah UMKM yang melakukan strategi online meningkat saat adanya Covid 19. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan rekomendasi untuk mempercepat pemulihan UMKM di Kabupaten Buleleng, Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, hendaknya menyediakan tempat pusat pemasaran produk UMKM (sejenis pusat pasar oleh-oleh). Nantinya tempat tersebut akan dijadikan tempat promosi sekaligus tempat penjualan produk UMKM.

Bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, hendaknya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung pemasaran berbasis online (digital marketing). Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar. Adapun materi pelatihan yang dimaksud berupa:

1. Tata Kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, marketplace, dan sejenisnya.
2. Pengenalan dan implementasi online mobilization mix (bauran mobilisasi online) meliputi share, hype, actionable, relevant dan emotional. Bauran pemasaran ini sebagai respon adanya perubahan pasar. Era connected society adalah era

dimana teknologi hadir dalam setiap aktivitas manusia dan merubah kehidupan manusia termasuk merubah pasar (perilaku konsumen).

3. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan packaging (kemasan produk). Kemampuan ini mutlak diperlukan sebagai wujud respon terhadap tuntutan pasar.
4. Pelatihan terkait branding produk. Selama ini kemampuan ini relatif terabaikan, karena ada kecenderungan pelaku UMKM lebih fokus dalam kegiatan produksi.
5. Pelatihan terkait self motivation (motivasi diri) dengan menghadirkan coaching atau motivator yang kompeten.

Kegiatan ini penting dilakukan untuk memompa dan merawat semangat pelaku UMKM serta siap menghadapi segala tantangan yang ada. Bagi Pelaku UMKM, mesti melakukan rekonstruksi diri dengan meningkatkan jiwa wirausaha, meningkatkan ketahananmalangan usaha, melakukan legalisasi usaha, dan terpenting hendaknya merubah cara berpikir sehingga lebih siap bertransformasi menuju marketing digital sistem.

Ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, pengaruh buruk alam telah banyak mempengaruhi total hasil panen pertanian. Selain karena faktor alam (cuaca), faktor harga jual juga menjadi resiko yang sangat mempengaruhi pendapatan pedagang yang pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima. Keberanian para pedagang untuk menerima resiko sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha yang dilakukannya. Ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, banyak dampak yang terjadi bagi perekonomian masyarakat Indonesia, terutama pedagang di pasar tradisional. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan sampai ada yang melakukan karantina parsial sehingga banyak pedagang yang merugi karena pembeli sangat jarang bahkan tak ada.

Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski dengan resiko ditertibkan. Hal itu, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian. Dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Sumatera Utara sangat besar, dari beberapa masyarakat yang kesulitan bahkan kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, lumpuhnya berbagai akses jalan raya di beberapa kota di Sumatera Utara terutama di Medan yang mengalami Zona Merah (Kirana dkk, 2020). Sementara pertumbuhan ekonomidiperkirakan mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5%, dan bahkan bisa menjadi minus 0,4%. Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani dan masyarakat miskin (Eddyono dan Suzanna, 2020). Siklus aktivitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, maka pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat (Olaniyi, 2020). Eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Tercipta 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar). Situasi ini secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan, dimana

perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim, pada saat yang sama produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian (Kurniawansyah dkk, 2020).

Jeritan Pedagang Kaki Lima tentang Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokasi jualan atau sepi pembeli menjadi sebab banyak pedagang yang terpaksa harus berhenti berjualan. Seperti yang dialami Puji Rahayu, salah seorang penjual makanan di Purbalingga Food Center (PFC). Sehari-hari, wanita berusia 30 tahun itu menjajakan opor, namun sejak Covid-19 mewabah sehingga PFC ditutup membuat Puji terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya. "Saya tidak pernah (lagi) jualan opor di PFC semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu saja di rumah. Suami saya kebetulan di Bandung, tapi kan nggak bisa pulang sudah 5 bulan," tutur Puji. Nasib serupa dialami oleh Deni Hamdani (32), pedagang asal Kemangkong yang biasa berjualan di PFC. Sejak merebaknya virus Corona di Purbalingga dan PFC ditutup, Deni tak lagi mempunyai penghasilan. Karenanya, Deni berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, jumlah korban yang jatuh pun berkuang, dan masyarakat makin disiplin menaati anjuran pemerintah. Kondisi kedua pedagang tersebut dan para pedagang lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyatakan para pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan layak untuk memperoleh bantuan. "Pedagang kaki lima yang ada di lingkungan wilayah kota, mereka merupakan salah satu masyarakat yang terdampak karena omzet mereka sudah barang tentu mengalami penurunan yang drastis dengan adanya pandemi Covid-19," kata Tiwi saat menyerahkan bantuan sembako kepada para pedagang di halaman pendopo Dipokusumo, Jumat pagi (8/5/2020). Adanya penurunan omzet para pedagang diakui oleh Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia, Kunto Hari Wibowo. Bahkan, ada pedagang yang terpaksa mengalami penurunan omzet hingga 50 persen. "Dan memang

berdasarkan survei dari Bank Indonesia, UMKM sangat terpuuk dengan kondisi seperti ini. Bahkan dari beberapa survei ada sejumlah PKL yang mengalami penurunan omzet sampai 50%," jelasnya saat penyerahan bantuan bersama Bupati Tiwi. Bantuan yang diberikan adalah hasil kerja sama Pemkab Purbalingga dengan Bank Indonesia. Bantuan berupa 569 paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak korona. Dampak Covid-19 Terhadap Penurunan Pendapatan Pedagang Kaki Lima-Di saat pandemi seperti ini, bukan hanya kegiatan belajar-mengajar saja yang menjadi terhambat, namun perekonomian masyarakat juga ikut terhambat. Pandemi COVID-19 imbasnya sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan, seperti Pedagang Kaki Lima. Ada beberapa yang menuai rugi, namun banyak juga yang merasakan untung. Sama halnya dengan Pedagang Kaki Lima yang bernama Kusmanto. Beliau merupakan pedagang Es Bubur Sum-Sum dari Jawa Barat. Pak Kusmanto mengakui dirinya mengalami penurunan besar akibat sepi pembeli. Beliau sampai menutup usahanya untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan karena imbas pandemi COVID-19. "Pas Corona ini muncul usaha saya sepi banget jarang ada yang beli, sampe sampe saya rugi besar. Dagangan saya pernah ga ada yang beli sama sekali, mungkin karna orang pada takut keluar rumah dan lebih memilih minum perasan lemon/jeruk nipis ketimbang minum es jajan luar. Pendapatan sama pengeluaran ya ga seimbang, alias kebanyakan pengeluarannya. Sedangkan tiap hari saya mesti makan. Pak Kusmanto juga bercerita saat masih berjualan, beliau masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun sekarang ini beliau tidak bisa memenuhi semua itu serta perekonomian keluarganya sangat terganggu. Nasib dagangannya jadi tidak menentu akibat kondisi COVID-19 yang tak kunjung usai hingga sekarang ini. "Kalau penghasilan dari berjualan ini dulu Alhamdulillah masih bisa menuhin kebutuhan keluarga, nah sekarang ini kalau gak jualan ya kebutuhan keluarga saya ga bisa terpenuhi" katanya. Karena itu, Pak Kusmanto sangat berharap agar Pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Selain itu, beliau juga berharap pemerintah tidak terlalu berlama-lama menerapkan kebijakan #DiRumahAja

.Sebab pemberlakuan kebijakan tersebut sangat terasa dampaknya untuk mereka yang menyambung hidup dengan berjualan secara langsung kepada masyarakat.

SIMPULAN

Pada masa pandemi sekarang dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini khususnya bagi masyarakat menengah bawah sangat besar, dan sangat jauh dari kata layak karena apa penghasilan mereka menjadi lebih sedikit berbanding terbalik dengan saat waktu sebelum pandemi itu berlangsung. Pandemi ini sangat merugikan banyak kalangan selain sektor pariwisata dan sektor -sektor lain yang bergelut tentang kehidupan bermasyarakat juga, sumber pencaharian yang semakin menipis. Ambil contoh saja pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berdagang secara berpindah-pindah yang seharusnya mereka berdiam di suatu tempat kini mereka berjualan di pinggi trotoar seperti yang terjadi di buleleng yaitu mereka membuka sebuah usaha di akses jalan yang seharusnya dimiliki oleh pengguna jalan kaki .Dampak ini sangat dapat dirasakan dan menjadi sebuah masalah yang hingga sekarang masih menjadi perkara yang sulit diselesaikan, karena kita sedang bermain dengan ekonomi dan keuangan demi kelangsungan hidup bersama. Dari pemerintah setempat sudah melakukan upaya agar masyarakat bisa mencari mata pencaharian lain selain itu, segala penertiban sudah dilakukan demi keamanan dan kenyamanan, namun komunikasi yang kurang berjalan dengan baik Antara warga dan kurangnya pemahaman menyebabkan ekonomi ini kian menurun dan di masa pandemi ini salah satu dampak yang dirasakan yaitu salah satunya pedagang kaki lima yang seharusnya mendapatkan penghasilan lebih menjadi sedikit dengan pemberlakuan jaga jarak.

DAFTAR PUSTAKA

Contoh Penulisan Sumber referensi:

Arini, I. A., & Paramita, I. B. (2020). Ekspektasi, Realisasi Dan Negosiasi Tourism Reborn Di Masa Pandemi Dalam Pariwisata Bali. *Cultoure*, 101-112.

Naba, I. B., & Paramita, I. B. (2021). Tradisi Siat Tipat Bantal Di Desa Kapal, Badung Sebagai Sebuah Daya Tarik Wisata. *Cultoure*, 24-36.

Paramita, I. B. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 57-65.

https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/silvia-novrizulmi/dampak-covid-19-terhadap-penurunan-pendapatan-pedagang-kaki-lima1um3zisi76M?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16216999861134&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fsilvia-novrizulmi%2Fdampak-covid-19-terhadap-penurunan-pendapatan-pedagang-kakilima-1um3zisi76M

<https://m.merdeka.com/peristiwa/jeritan-pedagang-kaki-lima-di-tengah-pandemicorona.html>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/nasib-pedagang-di-tengah-pandemi-covid-19/>
<https://balitribune.co.id/content/tegasnya-dishub-derek-pelanggar-parkir-di-terminalubung>

<https://sipp.menpan.go.id/berita/detil/kecamatan-gerokgak/operasi-penertiban-wajibpakai-masker>

<https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/44-penerapan-protokolkesehatan>